

MASIH ADA 145 WARGA SEPUTARAN TPA TANGGAN SRAGEN BELUM TERKAVER BPJS KESEHATAN



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/Resize_20231019_170322_2760.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 361 keluarga di seputaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggan, Kecamatan Gesi, Sragen, mendapat bantuan paket sembako senilai Rp100.000 di Balai Desa Tanggan, Kamis (19/10/2023) siang.

Mereka juga mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang preminya ditanggung APBD Sragen. Sementara itu dari 1.048 jiwa yang terdampak, masih ada 145 jiwa yang belum mendapat fasilitas BPJS dari APBD Sragen.

Bantuan paket sembako dan jaminan kesehatan BPJS itu merupakan kompensasi bagi warga yang terdampak TPA Tanggan.

Kepala Desa Tanggan, Mulyanto, menjelaskan penduduk desanya ada 1.850 keluarga. Mereka tersebar di 22 rukun tetangga (RT). Jumlah warga yang terdampak TPA Tanggan ada 350 keluarga atau 1.048 jiwa di enam RT.

“Dari 1.048 jiwa itu, ada 935 jiwa yang mendapat fasilitas BPJS kesehatan yang preminya ditanggung APBD. Masih ada 145 warga yang terkendala sehingga belum mendapat fasilitas yang sama. Sejauh ini bantuan sembako dan BPJS bermanfaat bagi warga. Selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Gesi,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sragen, Rina Wijaya, menerangkan bantuan sembako ini merupakan distribusi tahap ketiga 2023. Sasaran penerima bantuan ini

sebanyak 361 paket untuk 361 keluarga di enam RT yang berada dekat dengan TPA Tanggan.

“Kami mengharapkan distribusi sembako ini dapat bermanfaat bagi warga. Bantuan ini merupakan ekspresi rasa sayang Pemkab Sragen kepada warga,” jelasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sragen, Rina Wijaya, menerangkan bantuan sembako ini merupakan distribusi tahap ketiga 2023. Sasaran penerima bantuan ini sebanyak 361 paket untuk 361 keluarga di enam RT yang berada dekat dengan TPA Tanggan

“Kami mengharapkan distribusi sembako ini dapat bermanfaat bagi warga. Bantuan ini merupakan ekspresi rasa sayang Pemkab Sragen kepada warga,” jelasnya.

“Kami akan carikan solusi yang tepat. Akan diaudit satu per satu. Kalau tidak mampu membayar tunggakan dan betul-betul keluarga kurang mampu nanti bisa dibayari Baznas atau Matra karena masuk mustahik,” ujar Bupati.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/masih-ada-145-warga-seputaran-tpa-tanggan-sragen-belum-terkaver-bpjs-kesehatan-1771932>, “Masih Ada 145 Warga Seputaran TPA Tanggan Sragen Belum Terkaver BPJS Kesehatan”, tanggal 19 Oktober 2023.
2. <https://indonesiabuzz.com/145-warga-tpa-tanggan-sragen-belum-dapat-bpjs-kesehatan-bupati-janji-cari-solusi/>, “145 Warga TPA Tanggan Sragen Belum Dapat BPJS Kesehatan, Bupati Janji Cari Solusi”, tanggal 19 Oktober 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi